Respon Usulan Mensos Berikan Bantuan Jaminan Sosial Keluarga, Pemkab Pasuruan Verifikasi Data KPM Sesuai Skala Prioritas

Selasa, 22 Februari 2022

Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan melakukan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk menyikapi usulan Menteri Sosial (Mensos) Tri Risma Harini tentang bantuan Jaminan Sosial Keluarga, khususnya bagi KPM yang masih produktif.

Bupati Mujib Imron menginstruksikan Dinas Sosial untuk mendata ulang KPM, fokus pada mereka yang memiliki kondisi kesehatan prima dan siap untuk membuka usaha secara mandiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Wakil Bupati menekankan pentingnya persiapan matang dalam pendataan calon KPM Bantuan Jaminan Sosial Keluarga agar dapat menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan persyaratan. Selain itu, KPM yang masuk sebagai penerima PKH/BPNT harus dicabut dari penerima bantuan jika mereka menerima Jaminan Sosial Keluarga, agar tidak terjadi double data.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga akan melakukan pendataan sesuai skala prioritas untuk mengidentifikasi KPM BPNT/PKH yang memiliki potensi untuk bekerja. Mensos telah menawarkan akses pekerjaan kepada KPM yang dinilai produktif, dan ini akan membutuhkan legalitas untuk memastikan kelancaran program.

Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Kejayan, Mensos telah menawarkan bantuan stimulan sebagai modal usaha kepada dua KPM, dengan tujuan untuk membantu mereka mencapai kemandirian finansial dan terlepas dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.